

DAFTAR BACAAN LAMPIRAN

Buku-Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 83
- Alting, Husen, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, ha. 42
- Arba, H. M., *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 66.
- Budiawan, Haryo, “*Eksistensi, Perubahan, Dan Pengaturan Tanah Ulayat/Adat Di Indonesia (Kajian Kasus di Sumatera Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Kalimantan Tengah)*”, STPN Press, Yogyakarta, 2019, h. 61
- Harsono, Budi (II), “*Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*”, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, h. 43.
- Lexy J, Moloeng, *Metode Penelitian Kuskintatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, hal. 10
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet 8, Kencana, Jakarta, 2013
- Muliyadi, Lilik ”*Eksistensi Dinamika dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*”, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2017, h. 457

Sembiring, Julius, "*Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat*", STPN Press, Yogyakarta, 2018, h. 17

Sumardjono, Maria S.W., *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2009, h. 170

Syahrni Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 23

Widowati, Dyah Ayu, Ahmad Nashi Luthfi, dan I Gusti Nyoman Guntur "*Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*", Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Yogyakarta, 2014, h. 14

Tesis-Tesis

Andrianto, Fredy, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Produk Obat Herbal Ditinjau Dari Segi Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Cv. Naturafit Thibunnabawi)*." *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, h. 27.

Darakay, Boy Alexander, '*Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Untuk Perkebunan Kelapa (Bekas Hak Guna Usaha) Wamar Utara Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Di Desa Wangel Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku*', *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, h. 23.

Ronsumbre, Markus Metusalach, "*Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Ulayat Keret Rumbiak Sebagai Kepastian Hukum Dalam*

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, h. 25

Jurnal Hukum

Cahyaningrum, Dian “*Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi*”, Jurnal Negara Hukum, Volume 13, Nomor 1, Juni 2022

Hidayat, “*Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*”. Jurnal Hukum to-ra, vol.1 No. 3 Desember 2015, h. 184

Salam, Safrin, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat*, Jurnal Hukum Novelty, Vol.7 No.2 Agustus 2016, h. 210
Alting, Husen, “*Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2011, h. 91

Maramis, Marchel R. “*Kajian Atas Perlinungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Hukum, UNSRAT, Vol. 21, No. 4, 2013, h. 100.

Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, “*Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan*”, Jurnal WACANA, Nomor 33, 2014, h. 1

Nugroho, Romi, “*Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Lebak di Tinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017*”, Jurnal Pertanahan, Volume 7 Nomor 2, November 2017, h. 68

Poro, Stivani Marantka, Ali Imron, Wika Yuaha Shanty, “*Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tindakan Individualisasi Tanah Ulayat Untuk Tujuan Komersial*”, Bhirawa Law Journal, Volume 2, Issue 1, Mei 2021 h. 76

Putri, Lusi Riadina, “*Implementasi Program Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif di Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun*”, Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 3 Nomor 2, 2020, h. 54

Safiuddin, Sahrina, “*Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara*”, MIMBAR HUKUM, Volume 30, Nomor 1, Februari 2018, h. 69

Sari, Indah, “*Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)*”, Jurnal Mitra Manajemen, Volume 9, Nomor 1, 2017, h. 24

Wicaksono, Dian Agung, dan Ananda Prima Yurista, “*Inisiasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai*”, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 18 Nomor 2, Juni 2018, h. 278

Makalah-Makalah

Ruslan, Fikri, “*Perlindungan Hukum Hak Ulayat Atas Tanah Adat Pubabu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*”, Fikri Ruslan & Partner, Yogyakarta, 2021

Wicaksono, Guruh Risang, *“Tinjauan Perlindungan Hak Atas Hutan Adat di Indonesia”*, Surakarta, 2021, h. 3

Media Daring

Direktor Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, “Mengakui Hutan Adat Dan Masyarakat Adat” DIT JEN PPI (online), <https://ditjenppi.menlhk.go.id/dari-media/368-mengakui-hutan-adat-dan-masyarakat-adat.html#offcanvas>

Finaka, Andrean W., “Penguasaan Kawasan Hutan Dan Pemanfaatannya”, Indonesiabaik.Id, (online), 19 september 2017, h.1, <https://indonesiabaik.id/infografis/penguasaan-kawasan-hutan-dan-pemanfaatannya-2>

JDHIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI, “Penetapan Status Hutan Adat”, Jdih.maritim, (online), 29 November 2021, h. 1, <https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-hutan-adat>

Nahar, Melkior, ‘Belajar Dari Masyarakat Adat Pubabu’, Walhi.or.id (online), 10 April 2020, h. 1 www.walhi.or.id/belajar-dari-masyarakat-adat-pubabu

Tse, Kans M, ‘Masalah Tanah Besipae, Pihak Raja Amanuban Beberkan 9 Poin Penting’, Spektrum Nusa Tenggara Timur (online), 24 Agustus 2020, h. 1 <https://spektrum-ntt.com/artikel/baca/Masalah-Tanah-Besipae-Pihak-Raja-Amanuban-Beberkan-9-Poin-Penting-5f4365f174e12#>

Ulan,L “*Jalan Terjal Perjuangan Masyarakat Adat Pubabu TTS*”,
Voxntt.com (online), 27 Oktober 2017, h.1,
[https://voxntt.com/2017/10/27/jalan-terjal-perjuangan-masyarakat-
adat-pabubu-tts/19395/](https://voxntt.com/2017/10/27/jalan-terjal-perjuangan-masyarakat-adat-pabubu-tts/19395/)

Wicaksono, Raden Ariyo, “*Konflik Panjang Masyarakat Adat Pubabu-
Besipae dan Pemerintah NTT*”, Betahita.id (online), 26 Agustus
2020, h. 1, [https://betahita.id/news/detail/5563/konflik-panjang-
masyarakat-adat-pubabu-besipae-dan-pemerintah-ntt.html.html](https://betahita.id/news/detail/5563/konflik-panjang-masyarakat-adat-pubabu-besipae-dan-pemerintah-ntt.html.html)

Junaidi, Rahmati, “Perindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Adat di
Kalimantan Tengah (Kesiapan Kabupaten/Kota Dalam Menyusun
Peraturan Daerah Tentang Kawasan Hutan Adat)”, Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Tengah,
(online), 4 Juli 2018, h. 1,
[https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/perlindungan-hukum-
terhadap-kawasan-hutan-adat-di-kalimantan-tengah-kesiapan-
kabupatenkota-dalam-menyusun-peraturan-daerah-tentang-
kawasan-hutan-adat](https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/perlindungan-hukum-terhadap-kawasan-hutan-adat-di-kalimantan-tengah-kesiapan-kabupatenkota-dalam-menyusun-peraturan-daerah-tentang-kawasan-hutan-adat)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Peraturan Agraria Pengolaan

Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
(PP PKS)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU
Pemda)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 34 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,
Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

PMA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah-
masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/20212 tentang Pengukuhan Kawasan
Hutan

Permenhut Nomor P.62/Menhut -II/2013 tentang Perubahan Terhadap
Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan
Kawasan Hutan

Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.1/Menhut-II/2013 tentang
Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah